

ANALISIS KETAHANAN BPJS DANA PENSUN INDONESIA 2015-2019



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh:
Jasmine Permatahati
2011110065

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/X/2013
BANDUNG
2017

SUSTAINABILITY ANALYSIS OF INDONESIA'S BPJS PENSION FUND 2015-2019



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Degree in Economics

By
Jasmine Permatahati
2011110065

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS
Accredited by BAN – PT No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
BANDUNG
2017

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS KETAHANAN BPJS DANA PENSIUN INDONESIA
2015-2019**

Oleh:
Jasmine Permatahati
2011110065

Bandung, Juli 2017

Ketua Program Sarjana Ekonomi Pembangunan,

Dr. Miryam Lilian Wijaya

Pembimbing Skripsi,

Ivantia S. Mokoginta, Ph.D

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Jasmine Permatahati
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 14 Juni 1993
NPM : 20110065
Program studi : Ekonomi Pembangunan
Jenis Naskah : Skripsi

menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS KETAHANAN BPJS DANA PENSIUN INDONESIA 2015-2019

yang telah diselesaikan dibawah bimbingan: Ivantia S. Mokoginta, Ph.D

adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal :26 Juli 2017

Pembuat pernyataan:



(Jasmine Permatahati)

ABSTRAK

Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menaikkan usia pensiun di tahun 2019. Naiknya usia pensiun akan menaikkan pemasukan iuran dan *pooling* dana BPJS Dana pensiun. Peraturan ini mencerminkan kekhawatiran pemerintah akan ketahanan BPJS Dana Pensiun Indonesia. Penelitian ini meneliti ketahanan BPJS Dana Pensiun Indonesia melalui perhitungan PE/GDP. Penelitian ini melakukan peramalan dari tahun 2015-2019 dengan proyeksi nilai tren dan juga melakukan korelasi untuk mencari variabel mana yang paling berpengaruh. Hasil yang ditemukan adalah rasio PE/GDP meningkat dari tahun 2015-2016 kemudian menurun dari tahun 2016-2019. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan BPJS dana pension Indonesia tidak perlu dikhawatirkan. Hasil korelasi menunjukkan bahwa jumlah pensiunan adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga ketahanan dana pensiun Indonesia

Kata kunci: *Ketahanan dana pension, ketahanan BPJS Dana Pensiun, PE/GDP*

ABSTRACT

The government issued a regulation to raise the retirement age in 2019. Rising pension age will raise income's contribution and bigger pooling BPJS Pension fund. This regulation reflects the government's concerns about the resilience of BPJS Dana Pensiun Indonesia. This study examines the sustainability of BPJS Dana Pensiun Indonesia through the calculation of PE/GDP. This study is doing forecasting from 2015-2019 with trend value projection and also correlation to find which variable is influential the most. The results found are the ratio of PE/GDP increased from 2015-2016 then decreased from the year 2016-2019. This shows that the sustainability of BPJS Indonesia pension fund is not to be feared. The correlation results indicate that the number of pensioners is a factor that needs to be taken into account in maintaining the sustainability of Indonesia pension fund

Keywords: *Sustainability of pension fund, sustainability of BPJS Pension Fund, PE/GDP*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan bagi Allah SWT karena atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Ketahanan BPJS Dana Pensiun Indonesia 2015-2019”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Katolik Parahyangan. Selama proses penyelesaian skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Mama dan Babap, selaku orangtua penulis yang selama ini tidak ada hentinya memberikan semangat, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis. Terima kasih atas segala doa yang dipanjatkan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Juga adek-adekku Adrian, Audrey, nenekku, Mbu dan Wa Lia terima kasih atas semua dukungannya.
2. Ibu Ivantia S. Mokoginta, PH.D selaku pembimbing penulis. Terimakasih atas segala kesabaran, waktu, dorongan dan ilmu yang diberikan kepada penulis. Semoga semua pembelajaran yang didapatkan oleh penulis dapat berguna di masa depan.
3. Ibu Dr. Miryam B. L. Wijaya selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan. Terimakasih atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis. Semoga semua pembelajaran yang didapatkan oleh penulis dapat berguna di masa depan.
4. Bapak Ishak Somantri, Drs., MSP selaku dosen wali penulis. Terima kasih atas segala bimbingan dan arahan Bapak selama penulis menjalani masa perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas semua ilmu dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh teman-teman yang tak bisa disebutkan satu-satu. Terima kasih atas dukungan moral dan batin dalam mendorong penulis menyelesaikan ini semua.

Penulis ingin menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Segala kritik dan saran diharapkan oleh penulis untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 7 Juli 2017

Jasmine Permatahati

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
1.4 Kerangka Pemikiran	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Dana Pensiun	7
2.1 Ketahanan Sistem Dana Pensiun	9
2.3 Penelitian Sebelumnya	10
BAB III METODE DAN OBJEK PENELITIAN	13
3.1 Metode Penelitian	13
3.1.2 Data	13
3.1.3 Teknik Analisis	13
3.1.4 Model Penelitian	15
3.2 Objek Penelitian	17
3.2.1 Rasio PE/GDP	17
3.2.2 Expenditure	17
3.2.3 Pensiunan	18
3.2.4 GDP	18
3.2.5 WAP	19

3.2.6	Old age population	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		20
4.1	Hasil	20
4.1.1	Pemilihan Model Peramalan Tiap Variabel	20
4.1.2	Perhitungan PE/GDP.....	25
4.1.3	Korelasi Faktor-faktor PE/GDP	26
4.2	Pembahasan.....	27
BAB V PENUTUP.....		29
5.1	Simpulan	29
5.2	Saran untuk Penelitian Selanjutnya.....	29
DAFTAR PUSTAKA		30
LAMPIRAN		A-1
RIWAYAT HIDUP PENULIS		B-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran.....	6
------------	-------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Framework Analisis Adequacy (kecukupan) Dana Pensiun.....	11
Tabel 3.1	Pendoman Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi.....	14
Tabel 4.1	Nilai Standard Error dan Standard Deviation Expenditure.....	20
Tabel 4.2	Nilai Standard Error dan Standard Deviation Pensiunan.....	21
Tabel 4.3	Nilai Standard Error dan Standard Deviation GDP	22
Tabel 4.4	Nilai Standard Error dan Standard Deviation WAP	23
Tabel 4.5	Nilai Standard Error dan Standard Deviation Old Population.....	24
Tabel 4.6	Hasil Korelasi PE/GDP	26
Tabel 4.7	Hasil Korelasi Old Age Depedency Ratio	26
Tabel 4.8	Hasil Korelasi Coverage	26

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Expenditure Indonesia 2007-2014	17
Grafik 3.2	Pensiunan Indonesia 2007-2014	18
Grafik 3.3	GDP Indonesia 2007-2014	18
Grafik 3.4	WAP Indonesia 2007-2014.....	19
Grafik 3.1	Old Population Indonesia 2007-2014	19
Grafik 4.1	Expenditure Indonesia 2007-2014 dengan Garis Tren	21
Grafik 4.2	Pensiunan Indonesia 2007-2014 dengan Garis Tren	22
Grafik 4.3	GDP Indonesia 2007-2014 dengan Garis Tren.....	23
Grafik 4.4	WAP Indonesia 2007-2014 dengan Garis Tren.....	24
Grafik 4.5	Old Age Population Indonesia 2007-2014 dengan Garis Tren.....	25
Grafik 4.6	% PE/GDP	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana pensiun memiliki karakteristik yang unik yaitu kontribusi di masa sekarang untuk *benefit* di masa yang akan datang yang diberikan secara berkala. Dana pensiun melakukan fungsi intermediasi yaitu menyalurkan dana dari pihak yang masih aktif bekerja (pihak yang kelebihan dana) ke pihak yang sudah pensiun (pihak yang kekurangan dana). Pihak yang masih produktif bekerja dan mendapat gaji akan berkontribusi sejumlah tertentu tiap bulannya yang nantinya akan diberikan kembali kepada mereka secara berkala (perbulan) pada saat mereka pensiun sampai mereka meninggal.

Dana pensiun sendiri terbagi atas dana pensiun privat dan dana pensiun publik. Penelitian ini membahas dana pensiun publik yang berada di bawah tangan pemerintah. Dana pensiun publik dapat juga disebut sebagai jaminan sosial dana pensiun. Sebagai jaminan sosial dana pensiun, berarti dana pensiun ini harus dapat menjangkau seluruh khalayak masyarakat suatu negara. Menjadi tugas pemerintah untuk membuat sistem yang dapat menjangkau secara menyeluruh dan juga adil dalam melakukan perhitungan iuran dan *benefit*.

Jaminan sosial dana pensiun merupakan hal baru bagi negara Indonesia. Sama seperti banyak negara lain di dunia, Indonesia juga punya keyakinan bahwa negara wajib melindungi rakyatnya agar terhindar dari ketiadaan penghasilan atau konsumsi pada usia lanjut yang disebabkan oleh ketidaksiapan mereka dalam melakukan perencanaan keuangan jangka panjang (Tanner, 2014). Di era globalisasi jaminan sosial sangat penting bagi ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan sumber daya manusia (ILO, 2015). Oleh karena itu, untuk memastikan penduduk usia lanjut ini tidak menjadi beban bagi keluarganya dan masyarakat secara keseluruhan, negara perlu mempersiapkan dan mengembangkan sistem jaminan pensiun secara nasional bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sarana pengentasan kemiskinan (*poverty relief*) dan pemerataan (*redistribution*) (Tanner, 2014).

Di Indonesia institusi yang mengurus jaminan sosial dana pensiun adalah BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan sosial) Dana Pensiun. Sebagai institusi baru,

BPJS Dana pensiun akan mengalami beberapa tantangan. Salah satu tantangannya adalah penetapan iuran dan *benefit* yang tepat. Hal ini sangat penting untuk menjaga *sustainability* BPJS Dana Pensiun Indonesia. Penetapan iuran dan *benefit* yang tidak tepat dapat membuat BPJS Dana Pensiun kekurangan dana. Jika BPJS Dana Pensiun kekurangan dana maka pemerintah harus mengucurkan dana dari anggaran pemerintah. Padahal dana itu dapat digunakan untuk hal lain seperti pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas yang nantinya meningkatkan perekonomian.

Meningkatnya populasi usia tua yang terjadi di sebagian negara maju menimbulkan masalah keberlanjutan finansial di sistem pensiun *pay as you go* (Peinado & Serrano, 2014). Kontrak sosial antar generasi yang telah dibuat melalui adanya transfer terhadap generasi tua dengan asumsi bahwa generasi bekerja akan melakukan hal yang sama, membuat para pembuat kebijakan dalam beberapa dasawarsa terakhir semakin khawatir dengan keberlanjutan sistem ini (Grech, 2010). Masalah ini terjadi karena ekspektasi pengeluaran pensiun meningkat tajam, akibat meningkatnya jumlah pensiunan, lebih tinggi daripada pendapatan di masa depan yang didapatkan dari kontribusi sosial (Peinado & Serrano, 2014). Peningkatan pembiayaan terhadap pensiun, kesehatan dan perawatan orang tua akan membebani *budget* pemerintah karena pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menurun akibat dari pengurangan secara bertahap populasi dari jumlah angkatan kerja (Balassone et al, 2009). Perhitungan yang salah akan keberlangsungan jaminan dana pensiun dapat membebani pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keberlangsungan jaminan sosial dana pensiun.

Di Indonesia sendiri, meningkatnya populasi usia tua juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan. Menurut Pusat Studi Apindo (2015) ada 3 hal yang perlu dikhawatirkan pada sistem jaminan dana pensiun di Indonesia:

- Sistem jaminan dana pensiun di Indonesia menganut manfaat pasti. Hasil simulasi jamsostek menunjukkan satu pekerja yang masuk pensiun harus didukung 6 pekerja baru.
- Penduduk Indonesia akan menua secara drastis dalam beberapa dekade mendatang. Perhitungan yang ada memperkirakan jumlah penduduk Indonesia usia 55 tahun ke atas akan meningkat 10% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2000 (sekitar 23 juta orang) menjadi kira-kira 30% dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2040 (sekitar 100 juta orang). Jumlah

penduduk Indonesia berusia 65 tahun ke atas juga akan meningkat drastis dari 4,5 % dari seluruh penduduk Indonesia (sekitar 10 juta penduduk pada tahun 2000), menjadi 18% dari seluruh penduduk Indonesia (sekitar 60,5 juta penduduk pada tahun 2050).

- Masalah kombinasi faktor usia. Usia yang cukup rendah untuk pensiun (55 tahun), jumlah waktu kerja yang relatif singkat untuk mendapat pensiun penuh (15 tahun) dan populasi yang menua cukup drastis

Hal ini juga ditunjukkan dengan keluarnya peraturan dari pemerintah untuk BPJS Dana Pensiun mengenai naiknya usia pensiun mulai tahun 2019. Peraturan ini mencerminkan kekhawatiran pemerintah akan sustainability BPJS Dana Pensiun Indonesia. Naiknya usia pensiun akan menaikkan pemasukan iuran dan *pooling* dana BPJS Dana pensiun. Keluarnya peraturan ini menunjukkan pemerintah sedang menjaga *pooling* dana BPJS dana pensiun.

Ada beberapa cara untuk mengukur ketahanan sistem dana pensiun. Salah satu cara yang sering digunakan adalah melalui perhitungan rasio pengeluaran dana pensiun dibandingkan dengan PDB. Karena itu penelitian ini bermaksud menganalisis ketahanan dana pensiun melalui perhitungan rasio PE/GDP .

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Perlu dilakukan perhitungan yang tepat agar iuran dan pengelolaan yang dilakukan di masa kini sudah tepat dan pemberian manfaat dapat dilakukan di masa yang akan datang. Kegagalan pengelolaan dana pensiun oleh BPJS Dana Pensiun juga akan menjadi tanggung jawab pemerintah yang pada akhirnya mempengaruhi ketetapan anggaran dan banyak hal lainnya. Hal ini membuat ketahanan institusi dana pensiun di Indonesia menarik untuk diteliti. Oleh karena itu peneliti ingin menganalisis ketahanan dana pensiun di Indonesia

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pembayaran manfaat dana pensiun adalah sesuatu yang tidak dapat ditunda. Sistem jaminan dana pensiun Indonesia nantinya akan menjadi sumber pendapatan pada masyarakat pensiunan Indonesia. Dibutuhkan perhitungan yang tepat untuk mengetahui keberlangsungan sistem dana pensiun Indonesia. Jika ketahanan BPJS Dana Pensiun Indonesia tidak terjaga maka hal itu akan mengganggu pengeluaran pemerintah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ketahanan BPJS Dana Pensiun Indonesia dengan menganalisis rasio ketahanan dana pensiun.

1.4 Kerangka Pemikiran

Perhitungan rasio pengeluaran dana pensiun dibandingkan dengan PDB adalah salah satu cara untuk mengukur ketahanan dana pensiun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran dana pensiun mungkin beragam (Marcinkiewicz dan Chybalski, 2014). Penelitian-penelitian yang ada pun menggunakan berbagai pemahaman yang berbeda-beda akan faktor-faktor yang turut mempengaruhi. Faktor-faktor yang dipilih mempengaruhi ketahanan dana pensiun didasarkan pada sifat pensiun dan sistem pensiun. Sistem pensiun yang banyak digunakan di banyak negara termasuk Indonesia adalah sistem *pay as you go*. Sistem *pay as you go* dipilih karena paling cepat dalam mengumpulkan dana. Hal yang paling berpengaruh dalam sistem *pay as you go* adalah demografi penduduk, karena itu demografi penduduk adalah salah satu unsur utama dalam perhitungan *PE/GDP*.

Rasio *PE/GDP* adalah salah satu rasio yang sering digunakan dalam perhitungan ketahanan sistem dana pensiun. Rasio *PE/GDP* juga merupakan salah satu perhitungan resmi dari statistika Eropa. PE atau *pension expenditure* atau pengeluaran pensiun digambarkan sebagai salah satu indikator yang dapat menggambarkan bagaimana *benefit* dapat menyentuh para pensiunan. GDP atau PDB adalah bentuk produktivitas negara. Rasio ini digunakan karena ketika pengeluaran pensiun melebihi iuran yang masuk, maka sebagai salah satu pengeluaran publik, hal ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah akan menggunakan dana publik yang dimilikinya dimana dana publik tersebut digambarkan dengan *GDP* suatu negara.

Rasio *PE/GDP* akan melihat bagaimanapun ketahanan finansial suatu sistem dana pensiun nasional. Terjadinya ketahanan finansial sistem dana pensiun nasional akan membuat ketahanan dana pensiun yang baik dan pembayaran *benefit* pensiun yang lancar serta sesuai dengan salah satu prinsip dana pensiun yaitu menjaga pemerataan (*fairness*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Dana pensiun adalah suatu mekanisme antar generasi sehingga penting dijaga keberlanjutannya.

Terjaganya ketahanan sistem dana pensiun akan membawa perubahan baik bagi perekonomian Indonesia. Sistem dana pensiun yang baik akan membuat pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk menyelamatkan ketahanan finansial institusi dana pensiun. Penggunaan anggaran pemerintah pun dapat digunakan untuk hal lain yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian seperti pembangunan infrastruktur.

Menurut Bank Dunia (2010) dari Marcinkiewicz dan Chybalski (2014) terdapat 6 kriteria dalam memahami performa sistem pensiun yaitu:

- *coverage* ataupun cakupan suatu sistem pensiun baik yang skema wajib dan sukarela
- *adequacy* atau kecukupan ataupun apakah *benefit* pensiun mencukupi kehidupan para pensiunan
- ketahanan finansial bahwa sistem pensiun itu mampu bertahan secara finansial
- efisiensi ekonomi, bagaimana suatu sistem bisa mempengaruhi perilaku individu seperti meminimalisir adanya *free rider*
- efisiensi administrasi digambarkan dengan rendahnya biaya administrasi sistem pensiun yang ada
- *security of retirement benefit* atau apakah terjamin para peserta dana pensiun akan merasakan manfaatnya nanti

Dasar dari World Bank inilah yang banyak dipakai sebagai dasar penelitian ketahanan dana pensiun melalui penggambaran variabel-variabel dalam perhitungan *PE/GDP*. Penelitian-penelitian yang ada menggunakan variabel-variabel berbeda dalam menggambarkan 6 kriteria diatas sesuai data yang tersedia di tiap negara. Pada penelitian ini akan dilihat ketahanan finansial melalui perhitungan *PE/GDP*.

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

